

Implementasi Rumah Kebangsaan Pancasila Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor

Maisar¹, Saprudin², Rusliandy³

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: mairsapmap@gmail.com^{1*}, saprudin@unida.ac.id², rusliandy1980@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 09 Maret 2026

Revised : 18 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Published: 24 April 2026

Keywords: Pancasila National House, Pancasila Values, Community Based, Policy Implementation, Religious Moderation

Kata Kunci: Rumah Kebangsaan Pancasila, Nilai-Nilai Pancasila, Berbasis Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Moderasi Beragama

Abstract

This study examines the implementation of the Rumah Kebangsaan Pancasila policy in strengthening community-based understanding of Pancasila values in Kabupaten Bogor. The study responds to the gap in empirical research on Rumah Kebangsaan that has largely remained focused on formal education, central institutions, or specific groups rather than local communities. Using a qualitative descriptive case study, the research was conducted from August 2025 to January 2026 at Eduwisata Citra Alam Riverside, Kampung Pancasila Gunungputri, and Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussion, participatory observation, and documentation, and analyzed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that policy effectiveness is shaped by participatory communication, community-based social resources, positive implementer disposition, and flexible institutional structures. Each locus operationalizes Pancasila differently through experiential learning, social practice, and interfaith moderation. The novelty lies in the concept of Living Pancasila Based on Society and the integrated tri-locus model that places communities as the main actors of implementation. The study concludes that community-based implementation is more adaptive and effective than administrative top-down approaches in internalizing Pancasila values.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merespons keterbatasan studi empiris tentang Rumah Kebangsaan yang selama ini lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, lembaga pusat, atau kelompok tertentu, bukan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif pada Eduwisata Citra Alam Riverside, Kampung Pancasila Gunungputri, dan Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang selama Agustus 2025 sampai Januari 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh komunikasi partisipatif, sumber daya sosial berbasis komunitas, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur kelembagaan yang fleksibel. Setiap locus menghadirkan Pancasila melalui pembelajaran pengalaman, praktik sosial, dan moderasi lintas agama. Kebaruan penelitian terletak pada konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat dan model integrasi tri-lokus yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama implementasi. Simpulannya, implementasi berbasis masyarakat lebih adaptif dan efektif daripada pendekatan administratif top-down dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pancasila menempati posisi sentral sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber orientasi etik dalam kehidupan berbangsa. Namun, dalam konteks sosial kontemporer, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menghadapi tekanan yang makin serius. Tesis ini menegaskan bahwa gejala tersebut tampak pada meningkatnya intoleransi, polarisasi identitas, konflik sosial, melemahnya gotong royong, dan berkurangnya solidaritas sosial di tengah masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam situasi ini, kebijakan penguatan ideologi tidak lagi memadai bila hanya mengandalkan pendekatan formal dan seremonial; kebijakan harus hadir dalam praktik sosial yang hidup, partisipatif, dan dekat dengan pengalaman warga.

Rumah Kebangsaan Pancasila dikembangkan sebagai instrumen kebijakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila secara kolaboratif, kontekstual, dan berbasis komunitas. Berbeda dari pendekatan indoktrinatif, Rumah Kebangsaan diposisikan sebagai ruang edukasi, dialog, rekonsiliasi, dan pemberdayaan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek kebijakan. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan seragam. Tesis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kualitas relasi sosial, kapasitas aktor, dukungan sumber daya, dan fleksibilitas kelembagaan.

Kajian terdahulu yang diringkas dalam tesis menunjukkan bahwa penelitian tentang penguatan nilai Pancasila masih lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, peran lembaga pusat, isu kepemudaan, atau konteks tertentu seperti masyarakat urban, masyarakat adat, dan wilayah perbatasan. Ramadhan (2021), Hasanah (2021), Rohman (2020), Hartati (2020), Sulastri (2021), Wahyuni (2022), Nugroho (2022), Simanjuntak (2019), Maulana (2021), dan Yusuf (2023) sama-sama menyoroti pentingnya Rumah Kebangsaan, pendidikan nilai, dan lokalitas, tetapi belum secara spesifik menguji Rumah Kebangsaan Pancasila sebagai kebijakan publik berbasis masyarakat pada level implementasi lokal di Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, terdapat dua celah utama. Pertama, masih terbatas penelitian yang melihat Rumah Kebangsaan Pancasila bukan sekadar sebagai program sosialisasi, melainkan sebagai model implementasi kebijakan publik bernuansa ideologis. Kedua, masih sedikit penelitian yang menelaah bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi melalui praktik sosial masyarakat yang berbeda-beda dalam satu wilayah yang heterogen. Kabupaten Bogor penting dikaji karena memiliki keragaman

sosial, budaya, dan keagamaan yang tinggi, sekaligus menghadirkan kebutuhan nyata akan ruang dialog dan penguatan kebangsaan yang inklusif.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menawarkan pembacaan yang memadukan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan perspektif internalisasi nilai, pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi masyarakat. Kerangka ini relevan karena tesis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980), tetapi dalam kasus Rumah Kebangsaan keempat variabel itu bekerja secara optimal ketika ditopang oleh pengalaman sosial, pembelajaran kontekstual, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam pengertian ini, Pancasila tidak cukup diajarkan sebagai norma, melainkan perlu dihidupkan sebagai pengalaman sosial, sejalan dengan gagasan internalisasi nilai (Rokeach, 1973), pendidikan kewarganegaraan partisipatif (Branson, 1998), partisipasi dialogis (Freire, 1970), dan fungsi integratif nilai bersama dalam sistem sosial (Parsons, 1951).

Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini menegaskan konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat, yakni pemahaman bahwa Pancasila menjadi efektif ketika hadir sebagai praktik hidup kolektif, bukan hanya wacana normatif. Kedua, artikel ini merumuskan model integrasi tri-lokus berbasis masyarakat yang memperlihatkan bagaimana tiga ruang sosial berbeda eduwisata, kampung ideologis, dan kampung moderasi beragama sama-sama menjadi medium implementasi nilai Pancasila. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila di Kabupaten Bogor, menjelaskan kontribusinya dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila berbasis masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan statistik, melainkan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila, dinamika antaraktor, serta bentuk internalisasi nilai yang muncul dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Agustus 2025 sampai Januari 2026 di tiga lokus, yaitu Eduwisata Citra Alam Riverside Jogjogan Cisarua, Kampung Pancasila Desa Gunungputri, dan Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Ketiga lokus dipilih karena merepresentasikan model implementasi berbasis masyarakat dengan karakter sosial, budaya, dan pendekatan operasional yang berbeda.

Subjek penelitian dipilih secara purposif dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh implementasi kebijakan, meliputi pengelola Rumah Kebangsaan Pancasila, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah daerah, dan masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, focus group discussion, observasi partisipatif terhadap aktivitas kebangsaan di masing-masing lokus, serta studi dokumentasi terhadap pedoman program, materi kegiatan, publikasi, dan dokumen kelembagaan terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pisau analisis utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edward III, dengan empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam artikel ini, hasil disajikan secara tematik dan komparatif agar perbedaan karakter implementasi pada ketiga lokus dapat terlihat dengan lebih jelas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Rumah Kebangsaan Pancasila di Kabupaten Bogor tidak hadir sebagai satu bentuk kelembagaan yang seragam. Ia berkembang mengikuti karakter sosial komunitas, sehingga setiap lokus memunculkan corak implementasi yang berbeda. Meski demikian, seluruh lokus memperlihatkan arah yang sama, yaitu menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama internalisasi nilai-nilai Pancasila. Sintesis temuan utama disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila pada tiga lokus

Lokus	Komunikasi	Sumber daya	Disposisi dan struktur	Kontribusi utama
Eduwisata Citra Alam Riverside	Partisipatif dan edukatif, tetapi belum sepenuhnya terstruktur.	Didukung fasilitas wisata edukasi dan program berbasis pengalaman.	Pelaksana berupaya mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam experiential learning; struktur relatif lebih terkelola.	Menghidupkan Pancasila melalui pembelajaran pengalaman dan aktivitas edukatif.
Kampung Pancasila Gunungputri	Cenderung formal dan lebih top-	Bertumpu pada kekuatan sosial masyarakat	Komitmen kolektif pada gotong royong kuat, tetapi sebagian	Menguatkan praktik musyawarah,

	down.	dan tokoh lokal.	pelaksanaan masih administratif; struktur lebih kuat namun cenderung birokratis.	solidaritas sosial, dan gotong royong.
Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang	Dialogis, berbasis kepercayaan sosial dan relasi antarwarga.	Mengandalkan modal sosial, jejaring tokoh agama, dan dukungan komunitas.	Disposisi pelaksana kuat dalam moderasi dan toleransi; struktur fleksibel berbasis jaringan sosial-keagamaan.	Memperkuat toleransi, dialog lintas agama, dan harmoni dalam keberagaman.

Ditinjau dari aspek komunikasi, tesis menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor kunci implementasi kebijakan. Di ketiga lokus, nilai-nilai Pancasila lebih mudah diterima ketika disampaikan secara kontekstual, partisipatif, dan dekat dengan realitas keseharian warga. Pada Citra Alam Riverside, komunikasi dibangun melalui aktivitas edukatif, wisata pengalaman, dan keterlibatan peserta dalam pembelajaran. Di Kampung Pancasila Gunungputri, komunikasi lebih formal dan cenderung mengikuti pola top-down. Sebaliknya, di Cikoleang, komunikasi berkembang secara dialogis melalui relasi kepercayaan sosial dan moderasi lintas agama. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi tidak ditentukan semata oleh struktur formal, tetapi oleh kualitas hubungan sosial dan kemampuan menerjemahkan bahasa kebijakan ke bahasa komunitas.

Dari aspek sumber daya, keberhasilan implementasi tidak terutama ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kombinasi sumber daya sosial, kepemimpinan lokal, komitmen pelaksana, dan dukungan sarana yang tersedia. Citra Alam Riverside memiliki keunggulan pada fasilitas wisata edukasi dan desain program yang relatif terstruktur. Gunungputri dan Cikoleang lebih bertumpu pada kekuatan sosial masyarakat, partisipasi tokoh lokal, serta modal sosial yang terbentuk dari kebiasaan gotong royong dan interaksi komunitas. Kendati demikian, keterbatasan anggaran, dukungan finansial, serta pemanfaatan media digital masih menjadi hambatan yang mengurangi jangkauan dan keberlanjutan program.

Pada aspek disposisi, pelaksana di ketiga lokus menunjukkan kecenderungan positif terhadap nilai-nilai Pancasila, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Di Citra Alam Riverside, disposisi tercermin dari upaya sadar menggabungkan nilai Pancasila dalam konsep wisata edukasi. Di Gunungputri, kekuatan utamanya terletak pada sikap kolektif masyarakat dalam menjaga gotong royong dan solidaritas sosial, meskipun sebagian implementasi masih bergerak dalam pola

administratif. Di Cikoleang, disposisi tampak paling kuat pada praktik toleransi, kehidupan harmonis dalam keberagaman, dan moderasi beragama. Dengan kata lain, kepatuhan administratif saja tidak cukup; implementasi menjadi efektif ketika disertai komitmen ideologis yang benar-benar dihayati.

Struktur birokrasi dan kelembagaan dalam implementasi Rumah Kebangsaan Pancasila juga menunjukkan variasi. Struktur yang terlalu kaku berpotensi menghambat partisipasi, sementara struktur yang terlalu longgar dapat melemahkan akuntabilitas. Citra Alam Riverside dan Cikoleang cenderung memiliki struktur yang fleksibel dan adaptif, sedangkan Kampung Pancasila lebih kuat secara organisasi tetapi lebih birokratis. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ideologis di tingkat masyarakat membutuhkan struktur yang cukup jelas untuk menjaga keberlanjutan program, tetapi tetap terbuka terhadap adaptasi lokal dan inisiatif komunitas.

Selain menjelaskan proses implementasi, tesis juga menunjukkan kontribusi substantif Rumah Kebangsaan Pancasila bagi masyarakat. Pertama, Rumah Kebangsaan berfungsi sebagai media internalisasi nilai Pancasila yang efektif. Masyarakat tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi semakin melihatnya sebagai ideologi hidup yang relevan dalam praktik sehari-hari. Kedua, Rumah Kebangsaan membangun ruang dialog kebangsaan yang inklusif dan mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, aparat pemerintah, dan komunitas lokal dalam forum musyawarah dan diskusi yang konstruktif.

Ketiga, Rumah Kebangsaan mendorong moderasi dan toleransi sosial. Kontribusi ini tampak paling kuat di Dusun Cikoleang melalui dialog lintas agama dan praktik hidup harmonis dalam keberagaman. Keempat, Rumah Kebangsaan menghidupkan kembali nilai gotong royong melalui kegiatan kolektif, kerja sosial, pelatihan, dan aktivitas komunitas. Kelima, Rumah Kebangsaan memperkuat identitas kebangsaan dan ketahanan sosial masyarakat. Interaksi yang intensif dalam kegiatan kebangsaan membentuk solidaritas sosial yang penting untuk menghadapi radikalisme, intoleransi, polarisasi politik, dan pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Meski demikian, penelitian juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang perlu dicermati. Hambatan konkret muncul pada belum meratanya penyampaian informasi, bahasa kebijakan yang masih normatif, keterbatasan anggaran, variasi kapasitas pelaksana, belum adanya SOP yang kuat di sebagian lokus, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, tantangan yang lebih konseptual berkaitan dengan perlunya model implementasi yang lebih kontekstual, penguatan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, integrasi kearifan lokal, serta pengembangan strategi komunikasi yang mampu menjangkau generasi muda dan ruang digital. Dengan demikian, Rumah Kebangsaan Pancasila bukan tanpa masalah, tetapi justru menunjukkan bahwa keberhasilan

kebijakan ideologis sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap konteks lokal.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan relevansi teori implementasi kebijakan Edward III (1980), tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan ideologis berbasis masyarakat tidak dapat dipahami secara administratif semata. Keempat variabel Edward III bekerja secara dinamis dan saling terkait. Komunikasi yang efektif membutuhkan sumber daya sosial; sumber daya menjadi produktif ketika didukung disposisi positif; dan struktur kelembagaan hanya efektif jika cukup fleksibel untuk menampung inisiatif warga. Karena itu, artikel ini memandang bahwa keberhasilan Rumah Kebangsaan Pancasila di Kabupaten Bogor lahir dari kombinasi komunikasi partisipatif, modal sosial lokal, komitmen ideologis pelaksana, dan kelembagaan yang adaptif.

Hasil penelitian juga memperluas temuan studi sebelumnya. Ramadhan (2021), Sulastris (2021), dan Hartati (2020) menekankan pentingnya kelembagaan dan dukungan aktor kebijakan, sedangkan Hasanah (2021), Rohman (2020), Wahyuni (2022), dan Yusuf (2023) menunjukkan arti penting ruang dialog, pendekatan nonformal, dan lokalitas. Artikel ini menyintesis dua kecenderungan tersebut dalam konteks implementasi lokal: Rumah Kebangsaan efektif bukan hanya karena didukung kelembagaan, tetapi karena nilai-nilai kebangsaan diterjemahkan ke dalam praktik komunitas. Dengan demikian, artikel ini menggeser titik berat pembacaan dari program ke praktik sosial kebijakan.

Dari perspektif internalisasi nilai, temuan tesis selaras dengan Rokeach (1973). Pancasila menjadi lebih efektif ketika warga melewati proses kesadaran, pemahaman, penghayatan, dan penerapan. Pada Citra Alam Riverside, proses ini muncul melalui experiential learning; warga dan peserta tidak hanya menerima penjelasan, tetapi mengalami nilai secara langsung. Pada Gunungputri, internalisasi tampak dalam kebiasaan gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Pada Cikoleang, internalisasi tampak dalam praktik toleransi dan kehidupan harmonis lintas agama. Dengan kata lain, transformasi nilai terjadi ketika kebijakan menghadirkan pengalaman sosial, bukan hanya materi sosialisasi.

Pembacaan ini juga sejalan dengan pendidikan kewarganegaraan partisipatif. Branson (1998) menegaskan pentingnya pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan partisipatif, dan disposisi kewarganegaraan. Ketiga unsur tersebut terlihat dalam Rumah Kebangsaan Pancasila: warga memperoleh pemahaman nilai, terlibat dalam dialog dan kegiatan kolektif, lalu mempraktikkan toleransi, musyawarah, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna Freirean, proses tersebut bersifat dialogis dan memberdayakan karena warga bukan objek penerima doktrin,

melainkan subjek yang memaknai dan menghidupkan kebijakan (Freire, 1970).

Pada level yang lebih makro, hasil penelitian dapat dibaca melalui fungsi integratif nilai sebagaimana dijelaskan Parsons (1951). Dalam masyarakat majemuk seperti Kabupaten Bogor, Rumah Kebangsaan Pancasila berfungsi sebagai ruang yang menyatukan perbedaan di bawah nilai bersama. Namun, artikel ini tidak berhenti pada fungsi integratif belaka. Berbeda dari pembacaan normatif yang menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sosial justru lebih kuat ketika negara membuka ruang bagi interpretasi lokal terhadap Pancasila. Di titik ini, Rumah Kebangsaan dapat dipahami bukan sekadar alat ideologis yang menyosialisasikan nilai dari atas, tetapi arena interaksi negara-warga yang memungkinkan Pancasila menjadi hidup dalam praktik sosial.

Berdasarkan sintesis tersebut, kebaruan utama artikel ini ialah konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat. Konsep ini menempatkan Pancasila sebagai praktik kolektif yang dibentuk melalui pengalaman, relasi, dan partisipasi. Kebaruan kedua ialah model integrasi tri-lokus berbasis masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila tidak harus dibatasi pada satu format kelembagaan. Eduwisata menyediakan medium pembelajaran pengalaman; kampung ideologis menunjukkan penguatan nilai dalam praktik sosial; dan kampung moderasi beragama memperlihatkan pentingnya dialog lintas identitas. Ketiganya saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa kebijakan ideologis akan lebih berkelanjutan bila dirancang sebagai ekosistem sosial, bukan sekadar agenda program.

Implikasi praktisnya cukup jelas. Penguatan Rumah Kebangsaan Pancasila memerlukan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan komunitas. Pemerintah perlu memperkuat desain komunikasi yang kontekstual, memperluas kolaborasi lintas sektor, mengembangkan skema pendanaan yang lebih beragam, meningkatkan kapasitas pelaksana, dan membuka ruang partisipasi warga sejak tahap perencanaan. Pada saat yang sama, kearifan lokal perlu diintegrasikan sebagai medium penguatan Pancasila agar kebijakan tidak terasa asing bagi masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis masyarakat lebih efektif daripada pendekatan top-down dalam membangun ketahanan ideologi dan kohesi sosial.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila di Kabupaten Bogor berlangsung secara beragam sesuai karakter sosial, budaya, dan kelembagaan masing-masing lokus. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh komunikasi yang partisipatif dan

kontekstual, pemanfaatan sumber daya sosial komunitas, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur kelembagaan yang fleksibel tetapi tetap akuntabel. Ketiga lokus menunjukkan bahwa Pancasila lebih efektif diinternalisasi ketika dihadirkan dalam pengalaman sosial, praktik musyawarah, gotong royong, dan moderasi keberagaman, bukan semata-mata melalui sosialisasi formal.

Secara substantif, Rumah Kebangsaan Pancasila berkontribusi pada penguatan pemahaman nilai Pancasila, pembangunan ruang dialog kebangsaan, penguatan moderasi dan toleransi sosial, revitalisasi gotong royong, serta penguatan identitas dan ketahanan sosial masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat dan model integrasi tri-lokus berbasis masyarakat. Karena itu, pengembangan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan model implementasi berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi program yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. (1971). *Ideology and ideological state apparatuses*. London: Verso.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Firmansyah, A. (2023). *Evaluasi kebijakan Rumah Kebangsaan dalam meningkatkan ketahanan ideologi di kalangan masyarakat urban*. Universitas Padjadjaran.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Hartati, L. (2020). *Peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program Rumah Kebangsaan di Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Hasanah, M. (2021). *Peran Rumah Kebangsaan sebagai ruang dialog ideologis dan toleransi di kalangan pemuda*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maulana, H. (2021). *Pancasila sebagai living ideology: Studi kualitatif di masyarakat adat Baduy*. Universitas Padjadjaran.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Los Angeles: Sage.
- Nugroho, T. (2022). *Evaluasi implementasi program pembinaan ideologi Pancasila di sekolah menengah*. Universitas Negeri Malang.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. New York: Free Press.

- Ramadhan, D. (2021). Strategi BPIP dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Rumah Kebangsaan. Universitas Gadjah Mada.
- Rohman, A. (2020). Efektivitas program Rumah Kebangsaan dalam menumbuhkan nasionalisme pemuda. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
- Simanjuntak, B. (2019). Tantangan implementasi nilai Pancasila di era disrupsi digital. Universitas Gadjah Mada.
- Sulastri, D. (2021). Implementasi kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Universitas Indonesia.
- Wahyuni, R. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan nonformal di komunitas belajar. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yusuf, A. (2023). Penguatan wawasan kebangsaan melalui Rumah Kebangsaan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Universitas Mulawarman.